

Analisis Pengaruh Inflasi dan PDB Perkapita Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Ritel di Indonesia Periode 2010 – 2017

Analysis of Effect of Inflation and GDP Perkapita to Retail Level Demand in Indonesia
Period 2010 – 2017

¹Nita Apriliani, ²Azib, ³Ifa Hanifia Senjiati

^{1,2,3} *Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: ¹nitapril93@yahoo.com, ²azib_asroi@yahoo.com, ³ifa.wahyudin@gmail.com

Abstrak. Perkembangan sukuk ritel di Indonesia secara faktual tidak terlepas dari faktor kondisi perekonomian secara umum, dimana diantara indikator makro ekonomi tersebut adalah tingkat inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Perkapita. Hal ini menjadi indikator kondisi perekonomian masyarakat yang mempengaruhi perkembangan sukuk ritel. Maka masalah penelitian diuraikan pada rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana perkembangan tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2010–2017? Bagaimana perkembangan tingkat PDB Perkapita di Indonesia selama periode 2010–2017? Bagaimana perkembangan tingkat permintaan Sukuk pada Bank Syariah di Indonesia? Dan bagaimana pengaruh Inflasi dan PDB Perkapita terhadap permintaan Sukuk baik secara parsial maupun simultan pada Bank Syariah di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan meneliti tingkat inflasi dan PDB Perkapita serta pengaruhnya terhadap tingkat permintaan sukuk ritel di bank syariah serta analisa data dilakukan melalui perhitungan analisis regresi linier berganda dengan pengolahan menggunakan program SPSS seri 20 *for window*. Simpulan dari penelitian ini perkembangan tingkat laju inflasi dan PDB Perkapita di Indonesia selama periode 2010–2017 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Penjualan Sukuk pada Bank Syariah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan serta terdapat pengaruh Inflasi dan PDB Perkapita terhadap permintaan Sukuk secara simultan. Sedangkan secara parsial, inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan sukuk ritel, namun PDB Perkapita berpengaruh terhadap permintaan sukuk ritel di Indonesia.

Kata Kunci : Sukuk Ritel, Inflasi dan PDB Perkapita.

Abstract. The development of retail sukuk in Indonesia is factually inseparable from the general condition of the economy, which among the macroeconomic indicators is the inflation rate and the GDP per capita. This is also an indicator of the economic condition of the community that can affect the development of retail sukuk. Then the research problem is described in the formulation of the problem as follows: What is the development of inflation rate in Indonesia during the period 2010-2017? What is the growth rate of per capita GDP in Indonesia during the period 2010-2017? What is the development of Sukuk demand level at Sharia Bank in Indonesia? And how does Inflation and GDP per capita affect Sukuk demand either partially or simultaneously in Sharia Bank in Indonesia?. The research method used is analytical descriptive by examining inflation rate and GDP per capita and its effect on retail demand sukuk level in sharia bank and data analysis is done by calculation of multiple linear regression analysis with processing using SPSS series 20 for window. Conclusions from this study the development of the rate of inflation and GDP per capita in Indonesia during the period 2010-2017 experienced fluctuations that tend to increase Sukuk sales rate at Bank Sharia in Indonesia showed a significant increase and there is influence Inflation and GDP per capita to Sukuk demand simultaneously. While partially, inflation does not affect the demand for retail sukuk, but GDP per capita effect on demand for retail sukuk in Indonesia.

Keywords: Retail Sukuk, Inflation and GDP Per Capita.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Kegiatan investasi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seseorang dalam rangka mempersiapkan kebutuhannya di masa depan. Melalui kegiatan investasi, seseorang dapat melakukan perencanaan kebutuhan sedini mungkin yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Kemudian hal lain yang mendasari masyarakat

melakukan investasi adalah adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum mampu untuk dipenuhi saat ini, dan adanya keinginan untuk menambah nilai aset. Di Indonesia, orang yang melakukan kegiatan investasi bisa dikatakan masih sangat kurang. Kegiatan berinvestasi yang sangat bermanfaat dan banyak faedahnya dalam kehidupan seseorang ini fenomenanya sangat minim di Indonesia.¹

Pemerintah Indonesia dalam pengembangan investasi juga ditujukan sebagai instrumen pembangunan infrastruktur, maupun sebagai sarana investasi masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa saat ini pemerintah tengah meningkatkan laju pembangunan infrastruktur dan tentu membutuhkan banyak sumber pembiayaan disamping bersumber pendapatan Negara yang dihimpun.² Terkait hal di atas, maka Bapepam meluncurkan Pasar Modal Syariah pada tanggal 14-15 Maret 2006 sekaligus melakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI juga melakukan penanda-tanganan Nota Kesepahaman dengan PT Danareksa Investment Management yang selanjutnya membentuk *Jakarta Islamic Index* (JII) untuk kepentingan investasi syariah.³

Fenomena bangkitnya minat yang besar terhadap industri keuangan Islam tahun-tahun belakangan ini ditunjukkan dengan munculnya dan tumbuhnya bentuk sekuritisasi Islam (sukuk), yang memiliki kemampuan besar untuk menawarkan solusi keuangan yang inovatif.⁴ Perkembangan sukuk ritel di Indonesia secara faktual tidak terlepas dari faktor kondisi perekonomian secara umum. Adapun beberapa indikator makro ekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan sukuk ritel di Indonesia antara lain adalah tingkat inflasi, pendapatan masyarakat (perkapita) dan kurs Rupiah terhadap mata uang asing, perkembangan instrumen ekonomi syariah lainnya dan lain-lain. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada variabel tingkat inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Perkapita yang menjadi indikator kondisi perekonomian masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan sukuk ritel sebagai cerminan minat masyarakat untuk melakukan investasi khususnya pada instrumen investasi syariah berupa sukuk ritel.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perkembangan tingkat laju inflasi di Indonesia selama periode 2010 – 2017.
- b. Untuk mengetahui perkembangan tingkat PDB Perkapita di Indonesia selama periode 2010 – 2017.
- c. Untuk mengetahui perkembangan tingkat permintaan Sukuk Ritel pada Bank Syariah di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan PDB Perkapita terhadap permintaan Sukuk Ritel baik secara parsial maupun simultan pada Bank Syariah di Indonesia.

B. Tinjauan Pustaka

Investasi Syariah

¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta : Salemba Empat, 2001, Hlm. 2.

² Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hlm. 2.

³ Bapepam, *Instrumen Investasi Syariah*, LKK Bapepam RI, Jakarta, 2006, Hlm. 3

⁴ Huda, Nurul dan Edwin, Mustafa, Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 135.

Secara definitif, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.⁵ Dalam perspektif syariah, sebelum membahas definisi investasi yang bernuansa syariah terlebih dahulu dipaparkan apa yang dimaksud Syariah. Syariah dapat diterjemahkan sebagai jalan yang lurus, makna yang lebih jauh lagi adalah peraturan atau perundangan yang memuat aturan tentang hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta, juga hubungan antara manusia dan manusia. Tujuan keberadaan syariah adalah agar manusia hidup dengan aturan dari Tuhan sehingga mengukuhkan kedudukannya sebagai makhluk tertinggi di antara ciptaan Tuhan yang lain.⁶

Akar tekstual dalam Islam mengenai ajaran investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Allah SWT dalam al-Quran menganjurkan agar manusia bisa mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang dengan salah satu jalan melalui kegiatan berinvestasi, sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surat Al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷ Melihat makna dari ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diberi hak untuk mempersiapkan masa depannya. Segala tindakan preventif telah banyak dilakukan oleh manusia untuk mengatasi masalah-masalah tidak terduga. Salah satu cara adalah seperti menabung atau melakukan kegiatan investasi.

Islam sangat menganjurkan investasi bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan diinvestasikan tetapi ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Investasi dalam Islam harus mendatangkan kemaslahatan bagi pelakunya baik dalam kehidupan dunia maupun dalam dimensi ukhrawi serta bukan investasi yang akan menjerumuskannya kedalam keburukan dan dosa. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِذْ قُطِعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَلَاةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُسْتَعْمَلُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu, Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakannya”.⁸ Bersandar kepada hadist riwayat Imam Muslim tersebut di atas, kiranya investasi akhirat ini perlu dilirik karena menguntungkan bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan ikhlas khususnya pada aspek Shadaqah Jariyah yang merupakan

⁵ Nurul Hudah dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 4.

⁶ Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah : Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2008, Hlm. 2.

⁷ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2006, Hlm. 919.

⁸ Muslim Al Hajjaj Al Quarisy, *Shahih Muslim Jilid III Kitab Wakaf Hadits Nomor 1005* (Edisi Terjemahan), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, Hlm. 73.

salah satu bentuk investasi yang akan mengalir terus menerus, meskipun orang yang telah bersedekah tersebut sudah meninggal dunia.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengertian investasi syariah adalah aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung perbuatan “*maysir*” (judi), “*gharar*” (spekulasi), dan “*riba*” pada sebuah aset atau lebih. Selain itu, harus dipatuhi pula peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh fiqih tentang muamalah dan dimufakati juga diawasi oleh dewan pengawas syariah.¹⁰

Sukuk Ritel

Berdasarkan peraturan nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah, definisi sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.¹¹ Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 yang dimaksud dengan obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.¹²

Kemudian menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan.¹³

Sukuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk syariah sebagai kontrak atau subkontrak utama, yang paling penting adalah *shirakah*, *ijarah*, *salam* dan *istisna*. Dalam menerbitkan sukuk terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu¹⁴ :

1. Emiten, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan.
2. *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi :
 - a) sebagai penerbit sukuk,
 - b) *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset,
 - c) bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan investor.
3. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas

⁹ Suryani Elvira, “*Investasi Menuju Akhirat*”, <http://www.wasathon.com>, diakses pada tanggal 15 februari 2018

¹⁰ Heri Sudarsono, *Investasi Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hlm.. 4.

¹¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 109.

¹² *Ibid*, Hlm. 110.

¹³ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, *Mengenal Sukuk*, Brosur Departemen Keuangan.

¹⁴ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, *Mengenal Sukuk*, Brosur Departemen Keuangan.

underlying asset yang tidak dibagikan. Oleh karena itu investor berhak mendapat imbal hasil berupa sewa, marjin atau bagi hasil, tergantung jenis sukuk.

Inflasi

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Laju inflasi merupakan tingkat perubahan secara umum untuk berbagai jenis produk dalam rentang waktu tertentu misalnya per bulan, per triwulan atau per tahun.¹⁵ Terdapat tiga indikator untuk menghitung laju inflasi yaitu¹⁶ :

4. Indeks harga konsumen (*consumers price index*), Indeks harga konsumen mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar.
5. Indeks harga produsen atau perdagangan besar (*wholesale price index*), Indeks harga produsen mengukur harga pada tingkat produsen atau pedagang besar.
6. Indeks harga implisit (*GNP deflator*), Indeks harga ini merupakan perubahan harga atau nilai dari seluruh komponen GNP (yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto).

Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.¹⁷ Sehingga ketidakstabilan inflasi akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengganggu kegiatan investasi khususnya.

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan yang tercermin pula oleh turunnya return saham.¹⁸

PDB Perkapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk nasional bruto dan jumlah penduduk.¹⁹ Produk Domestik Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.²⁰ Secara matematis, rumus perhitungan pendapatan per kapita adalah sebagai

¹⁵ Asfia Murni, *Op-Cit*, Hlm 203.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 39.

¹⁷ www.bi.go.id diakses pada tanggal 15 Februari 2018.

¹⁸ Utami, M., dan Rahayu, M., *Peranan Profitability, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar dalam Mempengaruhi Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, 2003, Hlm. 3.

¹⁹ Joko Untoro, *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparasi Pendapatan dan Kemiskinan Massal*. Kawah Media, Jakarta, 2010, Hlm. 13.

²⁰ <https://www.bps.go.id/>

berikut :

Pendapatan PDB kapita = Produk Domestik Bruto / Jumlah Penduduk.

Pendapatan Perkapita suatu negara merupakan tolak ukur kemajuan dari negara tersebut, apabila pendapatan perkapita suatu negara rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di Negara tersebut mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan, tapi pendapatan tersebut bukan hanya didapat atau diperoleh dari mekanisme ekonomi masyarakatnya saja, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan atau peningkatan pendapatan tersebut seperti keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan keadaannya, kondisi alam ini dapat berubah sewaktu-waktu yang dapat menimbulkan bencana alam yang akan membuat pendapatan suatu negara akan mengalami penurunan.²¹

C. Hasil Penelitian dan Analisa Pembahasan

Perkembangan Tingkat Laju Inflasi Di Indonesia Selama Periode 2010 – 2017

Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mengurangi pendapatan dalam dunia usaha. Selanjutnya, hal ini juga akan berdampak buruk pada kinerja dunia usaha atau manajemen investasi yang tercermin oleh turunnya return saham suatu perusahaan atau sebuah manajemen investasi.

Secara teoritis, Inflasi dapat mempengaruhi perekonomian melalui pendapatan dan kekayaan, dan melalui perubahan tingkat dan efisiensi produksi. Inflasi yang tidak bisa diramalkan biasanya menguntungkan para debitur, pencari laba, dan spekulator pengambil risiko. Inflasi akan merugikan para kreditur, kelompok berpendapatan tetap, dan investor yang tidak berani berisiko. Dengan kata lain, Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun.

Secara historis, tingkat dan volatilitas inflasi Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang lain. Sementara negara-negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi antara 3% sampai 5% pada periode 2005-2014, Indonesia memiliki rata-rata tingkat inflasi tahunan sekitar 8,5% dalam periode yang sama. Bagian ini mendiskusikan mengapa tingkat inflasi Indonesia tinggi, menyediakan analisis mengenai tren-tren terbaru, dan memberikan proyeksi untuk inflasi masa mendatang di Indonesia yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Tingkat inflasi mengalami pasang surut dimana pada tahun 2010 - 2012 rata-rata inflasi di Indonesia berada pada level 3.2% sampai dengan periode tahun 2017 cenderung stabil berada pada level 5.5% yang disebabkan oleh faktor regional dalam negeri maupun kondisi ekonomi secara global.

Perkembangan Tingkat PDB Perkapita di Indonesia selama periode 2010 – 2017

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Perkapita di Indonesia menunjukkan kondisi

²¹ Sarsiti dan Rakiman. *Teori Ekonomi Makro*, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm. 80.

rata-rata pendapatan ekonomi pada masyarakat. Hal ini dapat menjelaskan sejauh mana tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena indikator pengukuran rasio PDB Perkapita dilihat dari pendapatan ekonomi atau *income* kepala kepala keluarga serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. PDB Perkapita juga dapat menjelaskan tingkat perekonomian di Indoensia, dimana dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait perkembangan PDB Perkapita periode 2010 sampai dengan 2017 menunjukkan bahwa. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen.

Mengutip data BPS, Senin 5 Februari 2018, PDB perkapita masyarakat Indonesia atas dasar harga berlaku pada 2013 mencapai Rp 38,37 juta. Setahun kemudian naik mencapai Rp 41,90 juta per orang. Data terakhir menyebutkan PDB perkapita masyarakat Indonesia mencapai Rp 45,18 juta per tahun. Namun jika menggunakan perhitungan mata uang dolar AS. Nilai PDB perkapita mengalami penurunan. Dari US\$ 3.666,75 pada 2013 menjadi US\$ 3.377,14. Penurunan tersebut memang lebih dikarenakan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS.

Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 4,79 persen, melambat bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,02 persen. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi tahun lalu berhasil dicapai lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi pemerintah yang mencapai 5,38 persen dan terjadi pada masa Pemerintahan Jokowi-JK.

Perkembangan Tingkat Penjualan Sukuk Pada Bank Syariah Di Indonesia

Perkembangan sukuk ritel di Indonesia yang diluncurkan oleh agen penjual sukuk dari 4 bank syariah meliputi BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin Syariah mengalami peningkatan. Keempat Bank Syariah yang meliputi, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bukopin Syariah dipercaya oleh Pemerintah untuk menjadi Agen Penjual Sukuk Negara Ritel, untuk melayani penjualan di Pasar Perdana (IPO) maupun di Pasar Sekunder. Sukuk Negara Ritel (SUKRI) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap Aset SBSN, dalam denominasi Rupiah dengan tingkat imbalan tertentu yang telah ditetapkan (*fixed coupon*).

Pada awal periode 2010, permintaan sukuk ritel di Bank Syariah masih sangat jauh dari target penjualan pemerintah rata-rata hanya mencapai 8 SBN saja senilai Rp. 2.1 Triliun. Namun pada periode 2011, permintaan sukuk ritel khususnya melalui agen penjualan bank syariah mengalami kenaikan menjadi rata-rata 18.5 SBN senilai Rp. 2.6 Triliun. Hal ini lebih disebabkan karena publikasi yang cukup efektif dilakukan keempat manajemen bank syariah yang menjadi agen penjual. Tren kenaikan permintaan sukuk ritel pada tahun 2011 kemudian berlanjut pada periode 2012 dimana jumlah SBN mencapai rata-rata 27.5 dengan nilai nominal investasi sebesar Rp. 2.7 Triliun. Pada periode 2013, permintaan sukuk ritel kembali mengalami peningkatan dengan jumlah rata-rata SBN yang terjual mencapai penjualan sebanyak 35 lembar dengan nominal Rp. 2.8 Triliun. Dengan demikian, maka dapat dikatakan selama periode 2010-2013 investasi syariah pada instrument sukuk ritel memiliki momentum yang baik dalam meningkatkan penjualannya.

Pengaruh Inflasi dan PDB Perkapita terhadap permintaan Sukuk baik secara parsial maupun simultan pada Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil output SPSS di atas maka dapat diperoleh sebuah persamaan, yaitu dengan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Persamaan dari hubungan antara Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita terhadap Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-180,328	11,764		
	Inflasi	,957	,896	,066	1,069
	PDB Perkapita	,005	,000	,924	14,967

a. Dependent Variable: Sukuk

$$Y = -180.328 + 0.957 \text{ Inflasi} + 0.005 \text{ PDB Perkapita} + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

7. Jika Inflasi dan PDB Perkapita (variabel independen) nol, maka nilai Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah (Variabel dependen) adalah -180.328
8. Jika Inflasi naik 1 satuan, maka Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah naik 0.957 satuan
9. Jika PDB Perkapita naik 1 satuan, maka Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah naik sebesar 0. satuan.
10. Variabel Inflasi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.957 dengan signifikansi 0.294 (> 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap variabel Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah.
11. Variabel PDB Perkapita menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.005 dengan signifikansi 0.000 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah.

Kemudian untuk menilai sejauh mana pengaruh Inflasi dan PDB perkapita terhadap perkembangan sukuk ritel, hal ini dapat dilihat pada hasil output dari koefisien determinasi (R-Square) :

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,971 ^a	,943	,939	4,65602

a. Predictors: (Constant), PDB Perkapita, Inflasi

b. Dependent Variable: Sukuk

Dari tampilan output SPSS model summary, besarnya adjusted R Square adalah 0.939, hal ini berarti 93.9% variabel Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah dapat

dijelaskan oleh variabel independen Inflasi dan PDB Perkapita. Sedangkan sisanya sebesar 6.1% ($100\% - 93.9\% = 6.1\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

12. Perkembangan tingkat laju inflasi di Indonesia selama periode 2010 – 2017 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2010 - 2012 rata-rata inflasi di Indonesia berada pada level 3.2%, kemudian pada periode 2013, tingkat inflasi di Indonesia kembali meningkat pada level 5.3%, serta pada tahun 2014 yang merupakan tahun politik di Indonesia yang memiliki dampak pada sendi-sendi ekonomi, tingkat inflasi di Indonesia mencapai level 6.6%.
13. Perkembangan tingkat PDB Perkapita di Indonesia selama periode 2010 – 2017 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 4,79 persen, melambat bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,02 persen. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi tahun lalu berhasil dicapai lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,06 persen.
14. Perkembangan tingkat penjualan Sukuk pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang baik dan signifikan. Hal ini terlihat dari awal periode penelitian pada tahun 2010 angka penjualan sukuk ritel masih di bawah target yang dicanangkan Pemerintah, namun pada periode 2017, jumlah permintaan sukuk ritel tidak mengalami peningkatan dan nominal investasi pun hampir sama senilai Rp. 3 Triliyun.
15. Inflasi dan PDB Perkapita terhadap permintaan Sukuk pada Bank Syariah di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya adjusted R Square adalah 0.939, hal ini berarti 93.9% variabel Permintaan Sukuk Ritel di Bank Syariah dapat dijelaskan oleh variabel independen Inflasi dan PDB Perkapita. Sedangkan sisanya sebesar 6.1% ($100\% - 93.9\% = 6.1\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Bapepam, Instrumen Investasi Syariah, LKK Bapepam RI, Jakarta, 2006.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2006.
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, *Mengenal Sukuk*, Brosur Departemen Keuangan.
- Heri Sudarsono, *Investasi Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakrata, 2003.
- Huda, Nurul dan Edwin, Mustafa, Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Joko Untoro, *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparasi Pendapatan dan Kemiskinan Massal*. Kawah Media, Jakarta, 2010.
- Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah : Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2008.
- Muslim Al Hajjaj Al Quarisy, *Shahih Muslim Jilid III Kitab Wakaf Hadits Nomor 1005* (Edisi Terjemahan), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.
- Nurul Hudah dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sarsiti dan Rakiman. *Teori Ekonomi Makro*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Suryani Elvira, “*Investasi Menuju Akhirat*”, <http://www.wasathon.com>, diakses pada tanggal 15 februari 2018.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta : Salemba Empat, 2001.

Utami, M., dan Rahayu, M., *Peranan Profitability, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar dalam Mempengaruhi Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2003.